

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024**

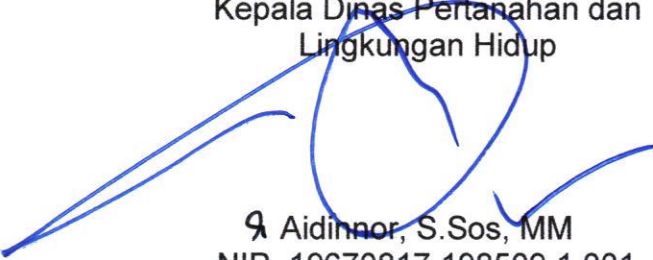
KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran VI bagian E.1.1 dan E.1.2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renja SKPD kepada kepala Bappeda, dan Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan-rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan amanat yang sudah dituangkan dalam aturan perundangan maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan telah menyelesaikan susunan Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2024.

Demikian Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Balangan.

Balangan, Juli 2024
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup



Aidinnor, S.Sos, MM
NIP. 19670817 198509 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB. IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam mencapai tujuan akhir organisasi.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja), suatu satuan kerja dapat membangun strateginya sebagai bagian terpenting dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7).

3. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap unit atau PNSD di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pelayanan tahunan masing-masing sub satuan kerja. Sedangkan tujuannya antara lain untuk:

1. Menyiapkan antisipasi perubahan yang akan terjadi secara pro-aktif;
2. Membangun strategi pencapaian hasil kerja tahun 2024;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
4. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar sub satuan kerja atau antar PNSD lingkup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Untuk menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan serta memperhatikan situasi-situasi internal dan eksternal tahun berjalan;
7. Untuk menyusun pedoman pencapaian kinerja tahunan sebagai aktualisasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara sistematis, terencana, terarah dan berkesinambungan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat dan integrasi dengan program/kegiatan sektor lainnya (lintas sektor).

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II

Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2024 sampai triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2024 pada Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp. 38.547.781.581,-
2. Realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp. 11.362.745.397,-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada APBD yang telah dilakukan sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi	
					I		II		7	
	2	3	4		5		6		7	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Point	11.371.614.531	68.5 Point	1.885.580.255	68.5 Point	5.847.408.526	68.5 Point	5.847.408.526
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	94.326.000	25 Persen	10.200.000	35 Persen	29.270.000	45 Persen	33.970.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.150.000	1 Dokumen	10.200.000	1 Dokumen	24.470.000	1 Dokumen	27.870.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.176.000	0 Laporan	0	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	6.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	7.927.355.731	25 Persen	1.605.872.585	35 Persen	4.430.089.960	45 Persen	5.074.397.270
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	7.861.784.531	46 Orang/bulan	1.595.792.585	46 Orang/bulan	4.405.239.960	46 Orang/bulan	5.044.107.270
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	32.785.600	0 Laporan	4.980.000	0 Laporan	14.650.000	0 Laporan	16.150.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	32.785.600	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	10.200.000	1 Laporan	14.140.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	48.315.000	25 Persen	0	35 Persen	0	35 Persen	0
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	48.315.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.420.176.600	25 Persen	185.802.302	35 Persen	1.004.316.323	45 Persen	1.261.487.540
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.989.400	0 Paket	0	0 Paket	9.699.000	0 Paket	9.699.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	318.220.200	0 Paket	0	1 Paket	312.550.000	1 Paket	312.550.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.638.000	0 Paket	0	0 Paket	14.181.500	0 Paket	14.181.500
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	38.604.000	0 Dokumen	3.300.000	0 Dokumen	20.120.000	0 Dokumen	20.120.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295 Laporan	973.725.000	75 Laporan	182.502.302	148 Laporan	647.765.823	173 Laporan	904.937.040
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	706.597.300	25 Persen	62.105.368	35 Persen	298.039.043	45 Persen	345.817.266
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.090.000	3 Laporan	3.900.000	5 Laporan	11.526.000	5 Laporan	12.826.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.601.000	3 Laporan	28.305.368	5 Laporan	57.999.543	6 Laporan	66.940.766
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.900.000	0 Laporan	0	2 Laporan	930.000	3 Laporan	2.817.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	489.006.300	3 Laporan	29.900.000	5 Laporan	227.583.500	6 Laporan	263.233.500

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.174.843.900	25 Persen	21.600.000	35 Persen	85.693.200	45 Persen	164.435.400
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	279.996.000	3 Unit	10.200.000	5 Unit	62.893.200	6 Unit	137.835.400
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	894.847.900	1 Unit	11.400.000	1 Unit	22.800.000	1 Unit	26.600.000
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 Persen	41.747.100	25 Persen	0	35 Persen	9.227.500	45 Persen	9.227.500
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian segketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	100 Persen	41.747.100	25 Persen	0	35 Persen	9.227.500	45 Persen	10.602.500
18	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.747.100	0 Dokumen	0	0 Dokumen	9.227.500	0 Dokumen	10.602.500
3	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100 Persen	27.711.700	25 Persen	0	25 Persen	0	25 Persen	0
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	100 Persen	27.711.700	25 Persen	0	25 Persen	0	25 Persen	0
19	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	27.711.700	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
4	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100 Persen	2.023.579.700	25 Persen	34.070.000	35 Persen	116.724.500	45 Persen	116.724.500
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	2.023.579.700	25 Persen	34.070.000	35 Persen	116.724.500	45 Persen	134.694.500

20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	10 Dokumen	1.775.518.700	0 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	44.212.300	3 Dokumen	52.982.300
21	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	248.061.000	0 Dokumen	32.570.000	0 Dokumen	72.512.200	0 Dokumen	81.712.200
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	590.330.000	25 Persen	35.270.000	30 Persen	44.970.000	40 Persen	44.970.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100 Persen	171.450.000	25 Persen	10.070.000	30 Persen	15.770.000	40 Persen	17.670.000
22	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	171.450.000	0 Dokumen	10.070.000	0 Dokumen	15.770.000	0 Dokumen	17.670.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 Persen	418.880.000	25 Persen	25.200.000	35 Persen	29.200.000	35 Persen	29.200.000
23	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	418.880.000	0 Dokumen	25.200.000	0 Dokumen	29.200.000	0 Dokumen	29.200.000
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100 Persen	1.026.762.550	25 Persen	103.258.300	35 Persen	221.695.300	45 Persen	221.695.300
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	100 Persen	973.417.650	25 Persen	101.078.300	35 Persen	219.515.300	45 Persen	276.577.700
24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	145.835.600	0 Dokumen	11.440.000	0 Dokumen	26.720.000	0 Dokumen	31.900.000
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	243.244.500	0 Dokumen	920.000	0 Dokumen	10.948.000	0 Dokumen	10.948.000
26	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	584.337.550	0 Dokumen	88.718.300	0 Dokumen	181.847.300	0 Dokumen	233.729.700

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	29.560.900	25 Persen	1.300.000	35 Persen	1.300.000	45 Persen	4.940.000
27	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	29.560.900	0 Laporan	1.300.000	0 Laporan	1.300.000	0 Laporan	4.940.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	23.784.000	25 Persen	880.000	35 Persen	880.000	45 Persen	15.520.000
28	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	23.784.000	0 Kegiatan	880.000	0 Kegiatan	880.000	0 Kegiatan	15.520.000
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen	7.370.766.300	25 Persen	606.486.203	30 Persen	1.381.478.071	40 Persen	1.381.478.071
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen	7.370.766.300	25 Persen	606.486.203	30 Persen	1.381.478.071	40 Persen	1.827.155.752
29	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4 Ha	747.336.800	2 Ha	54.309.927	4.1 Ha	185.045.322	4.8 Ha	238.404.827
30	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221 Ha	6.623.429.500	28 Ha	552.176.276	55.8 Ha	1.196.432.749	65.15 Ha	1.588.750.925
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100 Persen	46.560.000	25 Persen	7.855.000	25 Persen	10.285.000	35 Persen	10.285.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	100 Persen	46.560.000	25 Persen	7.855.000	25 Persen	10.285.000	35 Persen	18.095.000
31	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	23.280.000	0 Dokumen	4.290.000	0 Dokumen	5.800.000	0 Dokumen	8.910.000

32	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	23.280.000	1 Laporan	3.565.000	1 Laporan	4.485.000	1 Laporan	9.185.000
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100 Persen	91.556.000	25 Persen	19.660.000	35 Persen	37.775.000	45 Persen	37.775.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	100 Persen	91.556.000	25 Persen	19.660.000	35 Persen	37.775.000	45 Persen	47.885.000
33	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	44.906.000	0 Dokumen	10.060.000	0 Dokumen	18.380.000	0 Dokumen	22.130.000
34	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7 Badan Usaha	46.650.000	0 Badan Usaha	9.600.000	2 Badan Usaha	19.395.000	3 Badan Usaha	25.755.000
10	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100 Persen	16.808.800	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	100 Persen	16.808.800	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0

35	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	16.808.800	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 Persen	259.990.000	25 Persen	21.680.000	25 Persen	46.210.000	35 Persen	46.210.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100 Persen	259.990.000	25 Persen	21.680.000	25 Persen	46.210.000	35 Persen	50.310.000
36	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	259.990.000	1 Entitas	21.680.000	1 Entitas	46.210.000	1 Entitas	50.310.000
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	47.650.000	10 Persen	9.950.000	20 Persen	16.700.000	33 Persen	16.700.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 Persen	47.650.000	10 Persen	9.950.000	20 Persen	16.700.000	33 Persen	18.870.000
37	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	47.650.000	0 Pengaduan	9.950.000	0 Pengaduan	16.700.000	0 Pengaduan	18.870.000
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99 Persen	15.632.704.900	25 Persen	1.521.261.500	35 Persen	3.630.271.500	45 Persen	3.630.271.500
	Pengelolaan Sampah	Persentase Wilayah yang Bersih	99 Persen	15.632.704.900	25 Persen	1.521.261.500	35 Persen	3.630.271.500	45 Persen	5.113.511.600
38	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	35 Unit	7.299.476.900	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	797.694.900

39	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 Ton	1.431.393.000	825 Ton	167.752.500	1650 Ton	470.025.600	1925 Ton	553.413.600
40	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	6.901.835.000	375 Ton	1.353.509.000	750 Ton	3.160.245.900	875 Ton	3.762.403.100
Jumlah Anggaran dari seluruh Program				38.547.781.581		4.245.071.258		11.362.745.397		11.362.745.397
		-Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Balangan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat.								
		- Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengurangan sampah - SDM bidang teknis terbatas - Tidak ada penambahan luasan RTH - Masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengembangan Kebun Raya								
		- Memaksimalkan anggaran yang tersedia dan Membuat TS usulan anggaran. - Peningkatan Kapasitas SDM - Perlunya Penambahan luasan RTH - Memaksimalkan anggaran yang tersedia dan Membuat TS usulan anggaran.								

Sumber : e money Bappedalitbangda triwulan 2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2023	
1	Indeks Kualitas Air	-	50,40	50,40	50	
2	Indeks Kualitas Udara	-	91,27	91,27	93,97	
3	Indeks Kualitas Lahan	-	57,36	57,36	51.94	

Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan.
2. Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai.
3. Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal.
4. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara dan tenaga penganalisis data lingkungan;
2. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai dengan perundang-undangan;
3. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;
4. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

2.3 Analisis Sosial Ekonomi SKPD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

a) Meningkatkan Indeks Kualitas Air, udara dan lahan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R.
2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kebersihan jalan.
5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan.
6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK
7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah.
8. Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)
9. Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan.
10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan
11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan.

12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang.
14. Peningkatan pembangunan RTH public.

Pada program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan sosial ekonomi masyarakat diantaranya adalah Program pengelolaan persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Keberadaan sampah saat ini telah menjadi masalah nasional, maka kedepannya diharapkan pengelolannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Persampahan domestik saat ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode in-situ, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong sekitar perumahan. Sementara untuk sampah pasar dan sebagian perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA Batu Merah. Kegiatan pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara pengumpulan oleh masyarakat/petugas yang ditunjuk, sampah yang diangkut dari wadah-wadah rumah/persil kemudian dimuat ke gerobak-gerobak untuk selanjutnya dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sampah-sampah yang dipilah dapat dijual kembali ke pengepul sampah sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi maggot atau dijadikan pupuk organik dan sampah yang tidak terpakai di angkut ke TPA. Dari kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan persampahan.

Ketersediaan ruang terbuka dan Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan Regulasi yang mengatur batasan minimal sebesar 30% RTH harus dipenuhi secara bertahap. Proses pelaksanaannya memerlukan strategi terobosan untuk dapat membangun RTH publik di Kabupaten Balangan dengan diiringi kualitas dan sebarannya dari tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan sampai dusun/lingkungan yang ideal bagi lingkungan yang seimbang. RTH di permukiman padat di pusat kota atau lingkungan cepat tumbuh menjadi kendala karena ketersediaan lahan.

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka usaha dari makan minum, cinderamata, jasa penyewaan, penginapan, dll sehingga masyarakat dapat manfaat lebih dari ruang terbuka hijau. Sosial, ruang terbuka hijau merupakan tempat/media masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. RTH juga berfungsi sebagai kegiatan sosial ini terlihat pada beberapa RTH kemudian peran atau fungsi dari RTH sangat terlihat bahwa sumber perekonomian masyarakat dapat terbantu oleh adanya kunjungan masyarakat di RTH.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024, program yang akan dilaksanakan sebanyak 13 program, Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Pendanaan yang direncanakan sebesar Rp. 44.538.996.964,- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, masyarakat, sekolah, sungai dan beberapa perusahaan wilayah Kab. Balangan.

Kode	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023										
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	74,4	74,4	11.129.323.447,00	13.417.464.615,00	2.288.141.168,00	APBD	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	94.326.000,00	94.326.000,00	-	APBD	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	61.150.000	61.150.000	-	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	33.176.000	33.176.000	-	APBD	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	7.685.064.647,00	8.451.761.115,00	766.696.468,00	APBD	APBD

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	47	47	7.619.493.447	8.386.189.915,00	766.696.468,00	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	32.785.600	32.785.600	-	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	32.785.600	32.785.600	-	APBD	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	48.315.000,00	88.315.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	48.315.000	88.315.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.420.176.600,00	2.649.610.900,00	1.229.434.300,00	APBD	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	50.989.400	50.989.400	-	APBD	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	5	318.220.200	410.729.500,00	92.509.300,00	APBD	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	38.638.000	38.638.000	-	APBD	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	38.604.000	38.604.000	-	APBD	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	295	590	973.725.000	2.110.650.000,00	1.136.925.000,00	APBD	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	-	778.728.000,00	778.728.000,00	APBD	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	Kab. Balangan	-	Kab. Balangan	-	9	0	226.800.000,00	226.800.000,00	APBD	APBD
	Pengadaan Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	Kab. Balangan	-	Kab. Balangan	-	3	0	551.928.000,00	551.928.000,00	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	706.597.300,00	840.983.200,00	134.385.900,00	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	23.090.000	23.090.000	-	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	146.601.000	206.541.000,00	59.940.000,00	APBD	APBD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	47.900.000	74.244.000,00	26.344.000,00	APBD	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	489.006.300	537.108.200,00	48.101.900,00	APBD	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.174.843.900,00	513.740.400,00	(661.103.500,00)	APBD	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	10	279.996.000	359.886.000	79.890.000,00	APBD	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	1	894.847.900	153.854.400	(740.993.500,00)	APBD	APBD
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	590.330.000,00	583.427.400,00	(6.902.600,00)	APBD	APBD
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	171.450.000,00	29.850.000,00	(141.600.000,00)	APBD	APBD
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	171.450.000	29.850.000,00	(141.600.000,00)		APBD
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	418.880.000,00	553.577.400,00	134.697.400,00	APBD	APBD
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	418.880.000,00	553.577.400,00	134.697.400,00	APBD	APBD
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	1.026.762.550,00	1.526.762.390,00	499.999.840,00	APBD	APBD
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	973.417.650,00	1.473.417.490,00	499.999.840,00	APBD	APBD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	145.835.600	145.835.600	-	APBD	APBD

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	243.244.500	493.244.500	250.000.000,00	APBD	APBD
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	584.337.550	834.337.390	249.999.840,00	APBD	APBD
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	29.560.900,00	29.560.900,00	-	APBD	APBD
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	29.560.900	29.560.900	-	APBD	APBD
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	23.784.000,00	23.784.000,00	-	APBD	APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	23.784.000	23.784.000	-	APBD	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	7.370.766.300,00	9.314.084.810,00	1.943.318.510,00	APBD	APBD
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	7.370.766.300,00	9.314.084.810,00	1.943.318.510,00	APBD	APBD
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8,4	8,4	747.336.800	1.077.408.010	330.071.210,00	APBD	APBD
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	112,221	112,221	6.623.429.500	8.236.676.800	1.613.247.300,00	APBD	APBD
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	46.560.000,00	46.560.000,00	-	APBD	APBD
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	46.560.000,00	46.560.000,00	-	APBD	APBD

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	23.280.000	23.280.000	-	APBD	APBD
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	23.280.000	23.280.000	-	APBD	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	91.556.000,00	91.556.000,00	-	APBD	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	91.556.000,00	91.556.000,00	-	APBD	APBD
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	44.906.000	44.906.000	-	APBD	APBD
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7	7	46.650.000	46.650.000	-	APBD	APBD
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	16.808.800,00	16.808.800,00	-	APBD	APBD
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	16.808.800,00	16.808.800,00	-	APBD	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	16.808.800	16.808.800	-	APBD	APBD
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	259.990.000,00	246.497.500,00	(13.492.500,00)	APBD	APBD

	Perhatian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	259.990.000,00	246.497.500,00	(13.492.500,00)	APBD	APBD
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	259.990.000	246.497.500	(13.492.500,00)	APBD	APBD
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	47.650.000,00	47.650.000,00	-	APBD	APBD
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	47.650.000,00	47.650.000,00	-	APBD	APBD
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	47.650.000	47.650.000	-	APBD	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	99	99	15.632.704.900,00	17.125.430.750,00	1.492.725.850,00	APBD	APBD
	Pengelolaan Sampah	Persentase Wilayah yang Bersih	Persentase Wilayah yang Bersih	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	99	99	15.632.704.900,00	17.125.430.750,00	1.492.725.850,00	APBD	APBD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35	38	7.299.476.900	8.018.884.600	719.407.700,00	APBD	APBD
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3300	3300	1.431.393.000	1.363.923.250	(67.469.750,00)	APBD	APBD
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1500	1500	6.901.835.000	7.742.622.900	840.787.900,00	APBD	APBD
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	41.747.100,00	105.467.600,00	63.720.500,00	APBD	APBD

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	41.747.100,00	105.467.600,00	63.720.500,00	APBD	APBD
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	41.747.100	105.467.600	63.720.500,00	APBD	APBD
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	27.711.700,00	14.861.700,00	(12.850.000,00)	APBD	APBD
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	27.711.700,00	14.861.700,00	(12.850.000,00)	APBD	APBD
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	27.711.700	14.861.700	(12.850.000,00)	APBD	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	2.023.579.700,00	2.082.425.400,00	58.845.700,00	APBD	APBD
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	2.023.579.700,00	2.082.425.400,00	58.845.700,00	APBD	APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	10	1.775.518.700,00	1.775.681.300,00	162.600,00	APBD	APBD
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	248.061.000	306.744.100	58.683.100,00	APBD	APBD

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ini disusun sebagai arah kebijakan kegiatan perencanaan yang akan direalisasikan pada tahun 2024. Renja ini merupakan penjabaran empiris dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, khususnya yang berkenaan dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di lain pihak pembuatan Renja Perubahan ini juga sebagai perwujudan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman harus dijalankan secara efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna serta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip "**Good Governance.**"

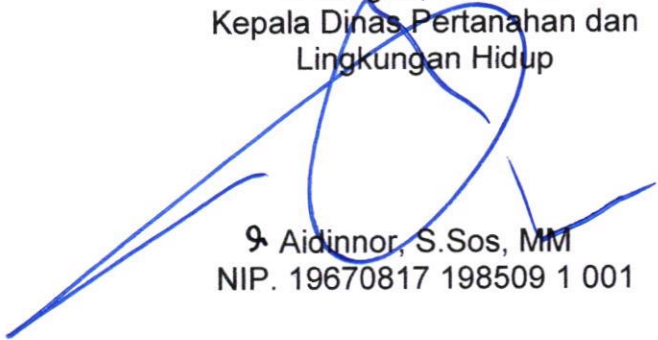
Dengan demikian, keberadaan konsepsi Renja oleh setiap SOPD sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peran SOPD yang bersangkutan agar dapat diciptakan kondisi yang maju dan proporsional secara terencana, sistematis, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyadari benar bahwa, kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih memwirausahakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (**Inputs Oriented Accountability**) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (**Results Oriented Accountability**). Kita bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong agar penyelenggaraan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten balangan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik yang menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (**Results Oriented Government**).

Terakhir, bahwa Renja ini bersifat intern dan dinamis. Artinya dipergunakan untuk kalangan terbatas pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, namun bersifat fleksibel terhadap berbagai macam perubahan dan tuntutan baik yang dimunculkan oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dinamis, berarti Renja Perubahan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang harus mampu menggambarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya dan harus mampu memberikan arahan bagi peningkatan dan pengembangan kondisi selanjutnya.

Balangan, Juli 2024
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup



☞ Aidinnor, S.Sos, MM
NIP. 19670817 198509 1 001